

**PENGARUH PENERAPAN PP NO 71 TAHUN 2010, PEMANFAATAN E-SBN  
RITEL ONLINE DAN GOOD GOVERNANCE (GG) TERHADAP  
KETERANDALAN LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

**Sri ayem\*  
Risda Isda**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

\*email: [sriayemfeust@gmail.com](mailto:sriayemfeust@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

**Keywords**

*This study aims to analyze the effect of the effect of the application of Government Regulation No. 71 of 2010, the use of online retail E-Business, and good governance (GG) on the reliability of financial statements in the Yogyakarta City Government. The research data was obtained from questionnaires (primers) which were distributed to the Government Assistant, Economic Assistant, General Administrative Assistant.*

*Application of PP No. 71 of 2010, e-SBN Online Retail and Good Governance*

*The population in this study were people who worked for the city government of Yogyakarta. The sample used in this study was 70 respondents. This study uses multiple regression analysis*

*The results of this study indicate that (1) The application of PP No. 71 of 2010 has no significant effect. This is evidenced by the results of t count 1.355 smaller than t table 1.66757 and the significance level of  $0.180 > 0.05$  (2) The use of online retail e-sbn has no significant effect. The test results show that the value of t arithmetic is 0.444 smaller than the value of t table 1.66757 and the significance level of  $0.658 > 0.05$  (3) good governance has a significant effect. Hypothesis test results state that the value of t count 3.374 is greater than the value of t table 1.66256 and the level of significance is  $0.001 < 0.05$ .*

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor publik dewasa ini ditandai dengan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas laporan keuangan atas lembaga-lembaga publik. Lembaga-lembaga publik itu meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa (Marlinawati dan Wardani, 2018). Pemerintah daerah adalah selaku tokoh utama dalam penyajian laporan keuangan yang akan dipublikasikan ke masyarakat harus bersifat terbuka dan memiliki kebenaran yang valid sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahaminya.

Kendalan laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan unsur nilai yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Marlinawati dan Wardani, (2018) menyatakan bahwa keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi benar atau valid (Nihayah, 2015). Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan keuangan hendaknya mampu memberikan informasi yang andal/valid dan tepat waktu serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Dengan demikian masyarakat akan percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar-benar rill dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pemakai akan mempercayai laporan keuangan jika informasinya tersebut dapat dipahami, tidak menyesatkan dan bermanfaat bagi pemakai. Berbagai hal ini lah yang menyebabkan pemerintah wajib memperhatikan keterandalan laporan keuangan karena merupakan karakteristik kualitas pelaporan keuangan, juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya jika laporan keuangan daerah dilakukan dengan cara transparansi dan akuntabilitas (Arina dkk, 2014).

Berdasarkan hal tersebut dari tahun ketahun masih banyak peristiwa mengenai keterandalan laporan keuangan, mulai dari tingkat kepercayaan laporan keuangan maupun pertanggung jawabannya. Peneliti tertarik untuk kembali meneliti apa saja yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan seperti pengaruh penerapan PP No.71 tahun 2010, Pemanfaatan *e-sbn ritel online* dan *good governance* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pernyataan ini didukung oleh Arina dkk, (2014) Peristiwa yang belakangan ini terjadi dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan yang merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak baik individu maupun kelompok pengguna informasi.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan pelaksanaan kandungan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi pemerintah mulai dari penerapan akrual basis, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP, (2006) adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

*e-sbn ritel online* adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, dengan adanya aplikasi ini memudahkan investor-investor muda untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan begitu pemerintah mampu meminimalisir pembayaran utang terhadap Negara Asing. Bagi pemerintah untuk meningkatkan lagi pendapatan Pemerintah dalam pencapaian dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru secara online yaitu dengan menjual surat berharga negara (SBN) untuk menanggulangi bunga retrun dari pinjaman utang luar Negeri (Kemenkeu RI, 2018).

Good governance di artikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang di landasi oleh etika profesional dalam usaha/ berkarya. Good governance merupakan wujud dari penerimaan dan pentingnya suatu perangkat peraturan untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan public (Azlina dan Amelia, 2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlinawati dan Wardani, (2018) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa, yaitu peneliti mengganti varabel independen nya menjadi pengaruh penerapan PP No.71 tahun 2010, pemanfaatan *e-sbn ritel online* dan *good governance* terhadap keterandalan laporan keuangan, kemudian studi kasusnya pada pemerintah kota yogyakarta. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti **“Pengaruh Penerapan Pp No 71 Tahun 2010, Pemanfaatan E-SBN Ritel Online, Dan Good Governance (GG) Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemkot”**.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengaruh Penerapan PP 71 tahun 2010 Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. SAP basis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penelitian Sako dan Lantowa, (2018) Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Pengaruh good governance, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja kementerian pariwisata menyatakan Standar akuntansi pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Kesuma dkk, 2017).

#### **H1: Penerapan PP No.71 tahun 2010 berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot**

### Pengaruh Pemanfaatan *e-SBN Ritel Online* Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah daerah

E-SBN ritel online adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, dengan adanya aplikasi ini memudahkan investor-investor muda untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan begitu pemerintah mampu meminimalisir pembayaran utang terhadap Negara Asing. Dengan demikian pemanfaatan *e-sbn ritel online* secara langsung berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemakaian aplikasi ini sudah pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, *e-sbn ritel online* adalah bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan dan mengemban amanah sebagai tanggungjawab mensejahterakan Masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Yaya dan Sofiyana, (2018) mengungkapkan beberapa keunggulan Sukuk Negara dibanding jenis instrumen penempatan dana lainnya. Pertama, sukuk adalah instrumen yang aman. Kedua, menguntungkan, yaitu adanya imbalan yang lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunga deposito perbankan. Ketiga, sukuk retail merupakan instrument investasi penempatan dana yang likuid. Keempat, sukuk juga dapat digadaikan atau dijadikan sebagai agunan kepada pihak lain.

#### **H2: Pengaruh Pemanfaatan e- SBN Ritel Online berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot**

### Pengaruh *Good Governance* Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan *good governance* dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Azlim dkk, 2012), sehingga tercapailah karakteristik kualitatif laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penelitian yang dilakukan Azlim dkk., (2012) pada SKPD pada kota Banda Aceh menunjukkan bahawa variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good governance* yang baik akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula.

Pengaruh *good governance*, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja kementerian pariwisata menyatakan Standar akuntansi pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Kesuma dkk, 2017).

**H<sub>3</sub>: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Sifat penelitian**

Penelitian ini termaksud penelitian kuasatif karena meneliti sebab akibat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian.

### **Definisi Operasional**

#### **Keterandalan Laporan Keuangan**

Keterandalan (Reliability) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi benar atau valid (PP No. 24 Tahun 2005).

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Penyajian jujur (Arfianti, 2011)
2. Realisasi (Nihayah, 2015)
3. Rekonsiliasi (Nihayah, 2015)
4. Informasi dapat diuji (Arfianti, 2011)
5. Netralisasi (Nihayah, 2015)
6. Pengarahan Informasi (Nihayah, 2015)

#### **Penerapan PP No.71 Tahun 2010**

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010).

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan
5. Evaluasi Kinerja

#### **Pemanfaatan e- SBN Ritel Online**

*e-sbn ritel online* adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, dengan adanya aplikasi ini memudahkan investor-investor muda untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan begitu pemerintah mampu meminimalisir pembayaran utang terhadap Negara Asing. Surat Berharga Negara (SBN) adalah surat berharga yang berupa surat pemangkuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008).

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Kinerja khusus
2. Kinerja umum
3. Kepercayaan keseriusan
4. Kepercayaan Kemampuan
5. Proses kinerja secara elektronik (Pramudiarta, 2015)
6. Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan (Nihayah, 2015).
7. Pengolahan informasi dengan jaringan internet (Pramudiarta, 2015)
8. Sistem manajemen (Pramudiarta, 2015)
9. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer (Nihayah, 2015)

### **Good Governance (GG)**

*Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan (*State private sector and society*)(Osborne and Geabler 1992,OECD and World Bank 2000, LAN dan BPKP, 2000 ; 6).

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) Elvira Zeyn, 2011
2. Partisipasi (*participation*) Elvira Zeyn, 2011
3. Akuntabilitas (*akuntability*) Elvira Zeyn, 2011
4. Koordinasi

### **Populasi,Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Sugiyono, 2014).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 70 yaitu responden pada bagian Asisten Pemerintah (sub bagian perundang-undangan, sub bagian otonomi daerah) Asisten Perekonomian (sub bagian aplikasi teknologi informasi dan telematika, sub bagian perangkat keras dan jaringan teknologi informasi) Asisten administrasi umum (sub bagian keuangan sekretariat daerah).

### **Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survai kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap orang-orang yang bekerja di pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pengujian keakuratan yang dilakukan adalah dengan menggunakan skala *likert* poin 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan media pengumpulan data berupa angket atau kuesioner. Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya, maka terlebih dahulu dilakukan *pilot test*. Selanjutnya, instrumen penelitian dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas.

**Teknik Analisis Data Uji Kualitas Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 16.0 (Statistical Package For Sosial Science).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Keandalan laporan keuangan Pemerintah daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien
- X1 = Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010
- X2 = *e-SBN Ritel Online*
- X3 = *Good Governance*
- e = Standar error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang berada di Pemkot Yogyakarta. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan penyebaran sebanyak 30 kuesioner pada tanggal 07 Agustus 2018, 15 Agustus 2017, 22 Agustus 2018, dan 29 Agustus 2018. Penyebaran kuesioner tahap kedua dilakukan pada tanggal 12 September 2018, 20 September 2018, 20 September 2018, dan 23 September 2018 sebanyak 70 kuesioner.

**Uji Kualtitas Data**

**Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data**

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan reliabel. Hal ini karena setiap butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,600.

**Uji Statistik Deskriptif**

Berikut ini adalah hasil pengujian model (Uji Statistik Deskriptif):

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SUMX1	70	23	33	28,59	2,197
SUMX2	70	47	65	57,69	4,282
SUMX3	70	20	30	24,71	2,058
SUMY1	70	29	40	34,16	2,512
Valid N (listwise)	70				

Sumber .data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa penerapan PP No.71 tahun 2010 memiliki rata-rata 28,59 dengan deviasi standar sebesar 2,197. Rata-rata *e-sbn ritel online* senilai 57,69 dengan deviasi standar 4,282. Selanjutnya, *good governance* memiliki rata-rata sebanyak 24,71

dengan deviasi standar sebesar 2,058. Keterandalan laporan keuangan sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sebanyak 34,16 dengan deviasi standar sebesar 2,512.

### Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi berganda

### Uji Normalitas Data

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07470940
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.622
Asymp. Sig. (2-tailed)		.833

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Sumber : olah data primer 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, maka data dinyatakan terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,622 dan nilai signifikansi sebesar 0,833 yang berarti lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
			Beta	t		tolerance	VIF
1 (Constant)	13.794	3.990		3.457	.001		
SUMX1	.213	.158	.187	1.355	.180	.545	1.836
SUMX2	.034	.076	.058	.444	.658	.609	1.643
SUMX3	.498	.148	.408	3.374	.001	.708	1.413

a. Dependent Variable: SUMY1

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa pengujian data dengan menggunakan program SPSS 16.0 menunjukkan penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Variabel penerapan PP No.71 tahun 2010 memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,545 dan nilai VIF sebesar 1,836. *e-sbn ritel online* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,609 dan nilai VIF sebesar 1,643. Nilai *tolerance* sebesar 0,708 dan nilai VIF sebesar 1,413 dimiliki oleh variabel *good governane*.

**Uji Heteroskedastisitas**

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejzer. Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan SPSS versi 16.0, maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang berada di atas 0,05.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.035	2.360		.015	.988
	SUMX1	.080	.093	.139	.856	.395
	SUMX2	.045	.045	.153	1.001	.321
	SUMX3	-.133	.087	-.217	-1.526	.132

a. Dependent Variable: RES2  
Sumber :data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.8, nilai signifikansi dari penerapan PP No.71 tahun 2010 sebesar 0,395. pemanfaatan *e-sbn ritel online* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,321. Nilai signifikansi dari *good governance* adalah 0,132.

**Asnalisis Regresi Berganda**

**Tabel 4.9**  
**Uji Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	13,794	3,990		3,457	,001
	SUMX1	,213	,158	,187	1,355	,180
	SUMX2	,034	,076	,058	,444	,658
	SUMX3	,498	,148	,408	3,374	,001

Sumber : olah data 2018

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dihasilkan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 13,794 + 0,213X_1 + 0,034X_2 + 0,498X_3 + e$$

Arti dari persamaan linier tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 13,794 menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari ketiga variabel independen, nilai keterandalan laporan keuangan Pemkot adalah 13,794.
- 2) Koefisien variabel penerapan PP No.71 tahun 2010 adalah 0,213 . Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan penerapan PP No.71 tahun 2010, sedangkan variabel lain konstan, akan meningkatkan keterandalan laporan keuangan Pemkot sebesar 0,213.



- 3) Koefisien variabel *e-sbn ritel online* adalah 0,034. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan *e-sbn ritel online*, sedangkan variabel lain konstan, akan meningkatkan keterandalan laporan keuangan Pemkot sebesar 0,034.
- 4) Koefisien variabel *good governance* adalah 0,498. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan *good governance*, sedangkan variabel lain konstan, akan meningkatkan keterandalan laporan keuangan Pemkot sebesar 0,498.

**Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)**

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	Standardized Coefficients	
	B	Std. Error		T	Sig.
1 (Constant)	13,794	3,990		3,457	,001
SUMX1	,213	,158	,187	1,355	,180
SUMX2	,034	,076	,058	,444	,658
SUMX3	,498	,148	,408	3,374	,001

a Dependent Variable: SUMY1

Pembuktian mengenai variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel serta tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

Berdasarkan Tabel 4.9 menjelaskan sebagai berikut: Pengujian H<sub>1</sub>. Variabel penerapan PP No.71 tahun 2010 memiliki nilai t hitung 1,355 lebih kecil dari nilai t tabel 1,66757 dengan nilai signifikansi 0,180. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PP No.71 tahun 2010 tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot. Dengan demikian H<sub>1</sub> tidak terdukung.

Pengujian H<sub>2</sub>. Variabel pemanfaatan *e-sbn ritel online* memiliki nilai t hitung 0,444 lebih kecil dari nilai t tabel 1,66757 dan nilai signifikansinya 0,658. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-sbn ritel online* tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot. Dengan demikian H<sub>2</sub> tidak terdukung.

Pengujian H<sub>3</sub>. Variabel *good governance* memiliki t hitung 3,374 lebih besar dari t tabel 1,66757 dan nilai signifikansinya 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot. Dengan demikian H<sub>3</sub> terdukung.

**Hasil Uji Model (Uji F)**

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138,267	3	46,089	10,242	,000(a)
	Residual	297,005	66	4,500		
	Total	435,271	69			

a Predictors: (Constant), SUMX3, SUMX2, SUMX1

b Dependent Variable: SUMY1S

Sumber: Data primer diolah 2018

Tabel 4.10 yang menggambarkan hasil uji simultan (uji F) menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Uji signifikansi simultan juga dapat diperhitungkan atas nilai F hitung 10,242 > F tabel 3,13, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Maka dapat disimpulkan variabel independen yaitu

penerapan PP No.71 tahun 2010, pemanfaatan *e- sbn* ritel online, dan *good governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta.

**Uji determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,564(a)	,318	,287	2,121

a Predictors: (Constant), SUMX3, SUMX2, SUMX1

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* adalah 0,287 atau 28,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi penerpan PP 71 No.71 tahun 2010, pemanfaatan *e-sbn* ritel online dan *good governance* dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan Pemkot sebesar 28,7%, sedangkan sisanya 71,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program SPSS versi 16.0, maka dapat disimpulkan mengenai hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

**Pengaruh Penerapan PP No.71 tahun 2010 terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot**

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan PP No.71 tahun 2010 berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta. Hasil uji hipotesis 1 menyatakan bahwa dengan hasil t hitung 1,355 lebih kecil dari t tabel 1,66757 dan tingkat signifikansi sebesar 0,180. Berdasrkan hasil tersebut dapat dsimpulkan bahwa penerapan PP No.71 Tahun 2010 tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta.

Definisi *Good Government Governance* Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011).

PP No.71 tahun 2010 tidak berpengaruh signifikan karna Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Kesuma dkk, 2017) penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. menginterpretasikan bahwa standar akuntansi pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan.

**Pengaruh Pemanfaatan e-sbn ritel online terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot**

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan *e-sbn ritel online* berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta. Hasil uji hipotesis 2 menyatakan bahwa nilai t hitung 0,444 lebih kecil dari nilai t tabel 1,66757 dan tingkat signifikansi 0,658 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *e-sbn ritel online* tidak pengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta.

Penerapan *e-sbn ritel online* tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Pemkot. Di sebabkan aplikasi *e-sbn ritel online* baru diterbitkan pada tanggal 14 mei 2018 aplikasi ini memang berdampak positif terhadap keterandalan pemerintah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa *e-sbn ritel online* mempunyai kendala-kendala terkait dengan kinerja dan belum sepenuhnya meningkatkan nilai dari surat utang negara (SUN). Selain itu DPK juga berperan penting dalam penetapan sukuk ritel. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Astria, 2018) dana pihak ketiga yang menjadi sumber likuiditas perbankan dapat tergoyahkan dengan diterbitkannya sukuk ritel, karena sukuk ritel memberikan investasi yang aman dan profit yang lebih tinggi bisa sebagai alternatif penyimpanan dana oleh masyarakat. Dengan demikian, jumlah sukuk ritel yang diterbitkan Negara, berpotensi menurunkan jumlah DPK yang dihimpun.

Yaya dan Sofiyana, (2018) menyatakan Sukuk ritel memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah. (Yuliatu, 2011) Pengaruh negatif signifikan ini sangat mungkin disebabkan oleh berbagai kelebihan yang dimiliki oleh sukuk ritel.

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007) sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying asset yang berada di tangan investor.

Teori TAM adalah alat ukur bagi pengguna teknologi informasi agar mampu mempengaruhi pemakai dari teknologi, pemakai informasi teknologi pada penelitian ini adalah calon investor-investor terutama investor muda yang ingin berinvestasi pada Pemerintah. Dengan teori TAM tidak hanya memprediksi tetapi juga mampu menjelaskan perilaku dari investor-investor tersebut.

Penelitian (Andriyani, 2016) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zuliarti, 2012) memberikan temuan empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lainnya pada penelitian (Ariesta, 2013) menemukan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Good Governance terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot**

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah *good governance* berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta. Hasil uji hipotesis 3 menyatakan bahwa nilai t hitung 3,374 lebih besar dari nilai t tabel 1,66256 dan tingkat signifikansinya 0,001. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governanc* berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Analisa data dilakukan terhadap 70 responden yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Pemkot di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan PP No.71 tahun 2010 tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot. Pemanfaatan *e-sbn ritel online* tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot. Sedangkan *good governance* dapat berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot.

### **REFERENSI**

- Arina, R., Sujana, E., & Sinarwati, K. 2014. "Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Azlim, Darwanis, & Abu, B. U. 2012. "Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar

Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1. No.1.

Azlina, N., & Amelia, I. 2014. "Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.12. No.2.

Kesuma, D. P., Choirul Anwar, & Darmansyah. 2017." Pengaruh *Good Governance*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Padasatuan Kerja Kementerian Pariwisata." *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika*, Vol.1. No.2.

KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. <http://ksap.org/memorandum>. Diakses pada tanggal 9 September 2015.

Marlinawati, & Wardani, D. K. 2018. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa." *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol.26. No.2, 131–143.

Nihayah, A. 2015." Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karesidenan Pati)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

RI, Kemenkeu. 2018. E-SBN, Cara Baru Berinvestasi Secara Online. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/e-sbn-cara-baru-berinvestasi-secara-online/>

Sako, U., & Lantowa, F. D. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo." *Journal Of Accounting Science*, Vo.2. No.(1), 43–54.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yaya, R., & Sofiyana, E. 2018." Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(2), 153–168.